

BAB 5

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan bab sebelumnya, dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan pembahasan mendalam terkait dengan implikasi perkembangan era ekonomi digital terhadap penyesuaian-penyesuaian kebijakan fiskal di Indonesia.

Pada hakikatnya munculnya revolusi industri ke empat, telah membuat perubahan yang mendasar dalam bisnis internasional yang merujuk pada definisi MNC itu sendiri yang tidak hanya menghasilkan produk-produk atau model bisnis secara fisik saja, tetapi juga telah mengubah aliran perdagangan baru ke arah digital sehingga dapat terhubung dengan masyarakat berbasis jaringan. Hadirnya internet dapat membuat sistem ekonomi lebih berdimensi. Bagi pemasok teknologi dan perusahaan yang mengadopsi teknologi baru seperti *Internet of Things* dapat menjanjikan sebuah pencapaian yang tidak selalu mudah untuk diperoleh. *Internet of Things* menjadi sebuah konsep yang dapat memberikan pemahaman bahwa telah ada tantangan baru yang akan mempengaruhi cara dalam berbisnis, sistem ekonomi, dan masyarakat.

Dalam penulisan ini, studi kasus yang dianalisis adalah bagaimana pemajakan Google sebagai sebuah perusahaan berbasis digital yang menyediakan layanan periklanan dengan bantuan jaringan internet selama periode 2016 sampai 2017 memiliki implikasi terhadap penyesuaian kebijakan pajak di Indonesia. Google merupakan salah satu perusahaan raksasa berbasis digital yang bermarkas

di Amerika Serikat. Pada awalnya Google hanya menjadi sebuah mesin pencari, tetapi seiring inovasi yang terus dilakukan, Google bertransformasi sebagai perusahaan digital yang menyediakan layanan atau jasa periklanan berbasis digital yang menggunakan jaringan internet sebagai pendukungnya. Selain itu fitur atau aplikasi yang disediakan oleh Google menjadi penyedia kebutuhan bagi masyarakat modern yang lebih cenderung menggunakan perangkat ponsel sebagai salah satu barang primer.

Penggunaan Google mengalami pertumbuhan yang signifikan. Salah satunya di Indonesia. Meningkatnya pengguna Google ini, tentu dapat menjadi pasar yang potensial bagi unit-unit bisnis lokal dalam memajukan bisnisnya di era digital seperti saat ini. Pesatnya perkembangan ekonomi di sektor digital harus diiringi dengan regulasi yang baik. Fenomena pemajakan Google dianggap kurangnya perhatian terhadap regulasi terkait dengan penetapan wajib pajak luar negeri badan usaha tetap oleh beberapa perusahaan yang berkategori sebagai layanan *Over The Top* (OTT) sehingga pemerintah Indonesia banyak mengeluarkan berbagai surat edaran yang bersifat penegasan terkait fenomena tersebut.

Google memang dikenal memiliki skema pemajakan yang cukup rumit. Sehingga apabila tidak diiringi dengan kesiapan dan penyesuaian regulasi yang kuat, maka sistem transaksi akan sulit untuk terdeteksi dan nihilnya kontribusi terhadap negara. Hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap penerimaan negara. Dalam upaya pemeriksaan terkait pembayaran pajak penghasilan, pemerintah masih menggunakan skema *self-assessment*. Pemajakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada Google dilakukan dengan perjalanan yang begitu

panjang dan melalui proses negosiasi. Sehingga Google mematuhi kebijakan negara dan setuju untuk melakukan pembayaran pajak penghasilan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan pemajakan terhadap perusahaan-perusahaan berbasis digital tersebut dapat dipajaki secara efektif.

Kemunculan fenomena ini tentu membuat Indonesia mengalami keterlambatan beradaptasi dalam upaya pembuatan regulasi yang didasarkan pada perkembangan era digital yang terus berkembang. Indonesia juga berupaya menyusun visi dan misi terkait kehadiran era ekonomi digital dengan menjadikan Indonesia sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020, oleh karena itu akan menghasilkan kebijakan-kebijakan baru yang muncul salah satunya adalah kebijakan likuiditas pasar bagi perusahaan-perusahaan *star-up* serta kebijakan baru yang harus memiliki Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Tetapi Visi dan misi ini akan berjalan dengan baik dan sesuai apabila Indonesia terus mempersiapkan diri dalam perkembangan pesatnya era ekonomi digital dengan serangkaian menciptakan hukum yang adil dan kepastian dalam mengatur sektor ekonomi digital baik domestik maupun asing khususnya pada model bisnis digital yang berkembang pesat dapat diminimalisir adanya indikasi pengurangan pembayaran pajak dan menempatkan pusat data lokal, sehingga lalu lintas transaksi elektronik khususnya pada transaksi bisnis yang dilakukan dapat dideteksi, sehingga pemerintah dapat memungut pajak dari transaksi yang dihasilkan.

Oleh karena itu terlihat jelas bahwa perkembangan ekonomi digital khususnya pada kehadiran badan usaha multinasional yang bekerja di sektor digital memberikan pengaruh terhadap kebijakan fiskal di Indonesia hal ini bisa

dilihat dengan upaya penyesuaian-penyesuaian kebijakan ekonomi nasional khususnya pada penetapan badan usaha tetap terhadap wajib pajak luar negeri terbukti dengan keluarnya Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia No.3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*) dan Surat edaran dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak SE-04/PJ/2017. Selain itu adanya perjanjian-perjanjian dengan negara lain akan sulit mengubah pembuatan kebijakan dalam negara Indonesia mengingat perjanjian tersebut memiliki asas yang berbeda. Sehingga harus ada pertimbangan membuat suatu pasal atau kerangka hukum dalam UUPPh yang bertujuan untuk menghindari adanya indikasi penghindaran pajak. Yang dimana kerangka hukum tersebut tidak tunduk terhadap perangkat hukum lainnya.

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemahaman baru dalam upaya memahami ilmu hubungan internasional yang lebih kompleks khususnya dalam bidang Ekonomi Politik Internasional yang dimana perkembangan pesat dari bisnis internasional khususnya dalam era digital yang dapat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan negara. Penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen dan analisis studi kasus terhadap fenomena yang terjadi pada proses pemajakan yang dilakukan oleh Google di Indonesia. Kasus ini telah membuat pemerintah mengeluarkan banyak surat edaran terkait dengan penegasan terhadap wajib pajak luar negeri agar dapat dipajaki apapun bentuk unit bisnisnya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan bagi peneliti atau pembaca lainnya untuk dapat menggunakan perspektif lain dalam memahami fenomena-fenomena serupa sehingga dapat menjadi bahan perbandingan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Ajami, R, dkk. (2006). *International Bussiness: Theory and Practice 2nd Edition*. M.E. Sharpe, Inc, New York.
- Bae, Young Ja. (2003). "Information Technology and the Empowerment of New Actors in International Relations", dalam *Journal of International and Area Studies*; Seoul 10.2 (79-92)
- Bakry,S,U. (2016). *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Baylis, J, Smith,S, and Owens,P. (2008). *The Globalization Of World Politics: An introducing to international relations*. Oxford University Press, New York.
- Blackman, T. (2007). *Globalization and Public Policy*, dalam buku George Ritcher. *Globalization*. Blackwell Publishing, Australia.
- Bradley, J, Barbier, J, Handler,D. (2013). *Embracing the Internet of everything to capture your share of \$14.4 trillion*. Cisco Systems.
- Brynjolfsson, E, & Kahin. (2000). *Understanding the Digital Economy: Data, Tools, and Research*. Massachusetts Institute of Technology, USA.
- Burchill, S, Linklater,A, dkk. (2005). *Theories of International Relations*. Palgrave Macmillan, New York.
- Burn, J, Marshall, P, dan Barnett, M. (2002). *e-Business Strategies for Virtual Organizations*. Reed Educational and Professional Publishing Ltd, Britain.
- Byrne, J, A. (1993), "The virtual corporation". *Business Week*. (<https://www.bloomberg.com/news/articles/1993-02-07/the-virtual-corporation>, diakses 08 februari 1993).
- Cabarello-Anthony, M. (2005). *Regional Security in Southeast Asia: Beyond the ASEAN Way*. Institute of Southeast Asian Studies, Singapore.

- Castell, Manuel. (2010). *The Rise Of Network Society :Second edition With a new preface*. Wiley-Blackwell, United Kingdom.
- Cavusgil, T, S, Knight, G, Riesemberger, R, J. (2008). *International Business: Strategy, Management, and the New Realities*. Pearson Prentice Hall, New Jersey.
- Croucher, L, S. (2004). *Globalization and Belonging : The Politics Of Identity in A Changing World*. Rowman & Littlefield Publishers, Oxford.
- Das, K,. Dkk. (2016). *Unlocking Indonesian's DigitalOpportunity*. McKinsey Indonesia Office, London.
- Deibert, Ronald. (1995). *Parchment, Printing and Hypermedia: Communication in World Order Transformation*. Columbia University Press, New York.
- Dunn, N, W. (1994). *Public Policy Analysis: An Introduction*. Prentice-Hall inc, New Jersey.
- European Commission. (2014). *Report of the Commission Expert Group on Taxation of the Digital Economy Taxation and Customs Union*. <https://ec.europa.eu>.
- Franke, U, J. (2002). *Managing Virtual Web Organizations in the 21st Century: Issues and Challenges*. Idea Group Publishing, United Kingdom.
- Friedman, L, T. (2005). *The World Is Flat A Brief History of the Twenty-first Century*. Picador Reading Group Guides, New York.
- Fuchs, C. (2008). *Internet and Society. Social Theory in the Information Age*. Routledge Research in Information Technology and Society, New York.
- Gilpin, Robert. (1987). *The Political Economy of International Relations*, Princeton University Press, New Jersey.
- Gunadi,. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*, MUC Consulting Group, Jakarta.

General Distribution OCDE/GD(96)102. (1996). *THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY*, Paris.

Global Economy, Global Technology, Global Corporations, (1998). Reports of a *Joint Task Force of the National Research Council and the Japan Society for the Promotion of Science on the Rights and Responsibilities of Multinational Corporations in an Age of Technological Interdependence*. <https://www.nap.edu/read/6113/chapter/6>.

Hadiwinata, S.B. (2002). *Politik Bisnis Internasional*. Penerbit KANISIUS, Yogyakarta

Hadiwinata, S, B. (2007). “Transformasi Isu dan Aktor di dalam Studi Hubungan Internasional: dari Realisme hingga Konstruktivisme”. Dalam Yulius P. Hermawan. *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi*. Graha Ilmu, Yogyakarta.

Holmquist, E, L. (2012). *Grounded Innovation: Strategies For Creating Digital Products*. Elsevier, USA.

<https://www.google.com/about/products/>

Infografis Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia Hasil Survey 2016 dan 2017. <https://www.apjii.or.id/>.

I. Wibowo. (2010). *Negara Centeng: Negara dan Saudagar di Era Globalisasi*, KANISIUS, Yogyakarta.

Jackson, Robert dan Georg Sorensen, Georg. (2014). *Introduction to International Relations: Theories and Approaches, Fifth Edition*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Johansson. B dan Stough, R.K.C, Stough, R. (2006). *The Emerging Digital Economy Entrepreneurship, Clusters, and Policy*. Springer Berlin Heidelberg, New York.

- Kahn, J. (2018). *Google's 'Dutch Sandwich' Shielded 16 Billion Euros From Tax*. (<https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-02/google-s-dutch-sandwich-shielded-16-billion-euros-from-tax>. diakses pada 01 Februari 2008)
- Keohane, R. O & Nye, J.S. (2000). *Globalization: What's New? What's Not? (And So What*, Foreign Policy, No. 118 , Spring, 2000, pp. 105-106.
- Kling, R & Lamb, R, "IT and Organizational Change in Digital Economies : A Sociotechnical Approach" in Brynjolfsson, E, & Kahin. (2000). *Understanding the Digital Economy: Data, Tools, and Research*. Massachusetts Institute of Technology, USA.
- Lane (1999), "Advancing the Digital Economy into the 21st Century" (*Assistant to the US President for Science and Technology*) Information Systems Frontiers 1:3, 317±320 (1999) # 2000 Kluwer Academic Publishers, Boston. Manufactured in The Netherlands.
- Lopez, Lubian. F. J, Esteves J. (2017). *Value in a Digital World : How to assess business models and measure value in a digital world*. Palgrave Macmillan, Switzerland.
- Manyinka. J. (2013). *Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy*. Mckinsey Global Institute, London.
- Manyika. J. Dkk. (2016). *DIGITAL GLOBALIZATION: THE NEW ERA OF GLOBAL FLOWS*. Mckinsey Global Institute, London.
- Maurer, K. (2018)**. *The 12 most popular digital products you can sell online*" (<https://easydigitaldownloads.com/blog/the-12-most-popular-digital-products-you-can-sell-online/>. diakses 16 Januari 2018)
- Morabito, V. (2014). *Trends and Challenges in Digital Business Innovation*. Springer Cham Heidelberg, Switzerland.
- Nugroho, Riant. (2017). *Publick Policy*. Pt Gramedia, Jakarta.

- Pangestu, M and Grace Dewi, G. (2017). "Indonesia and the digital economy: creative destruction, opportunities and challenges" dalam Edwin Jurriens and Ross Tapsell, *Digital Indonesia: Connectivity and Divergence*. ISEAS, Singapore.
- Rappa, M. (2006). *BUSINESS MODELS ON THE WEB*" MANAGING THE DIGITAL ENTERPRISE. (<http://digitalenterprise.org/models/models.html>. diakses 17 Januari 2010)
- Rioux, M. (2015). *Multinational corporations and transnational networks: Meeting the regulatory challenges ahead*. Coologique international Recherche & Regulation, Paris.
- Rugman, M, A, Collinson, S. (2006). *International Business 4th Edition*. Pearson Education Limited, England.
- Schwab, K. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*. World Economic Forum, Switzerland.
- Schmidt, E, dan Cohen, J. (2013). *The New Digital Age : Reshaping The Future of People, Nations, and Business*. ALFREDA.KNOPF, New York.
- Solichin, Abdul Wahab. (2016). *Analisis kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Stiglitz, E, J. (2006). *Making Globalization Work*. W. W. Norton & Company, Inc., 500 Fifth Avenue, New York
- Tapscott, D. (1976). *The Digital Economy: Rethinking Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*. McGraw Hill Education, USA
- Tapsell, R dan Jurriens, E. (2017). "Challenges and Opportunities of the Digital 'revolution' in Indonesia", *Connectivity and Divergence*. ISEAS, Singapore.
- Kemeneterian Keuangan RI (2013), *Undang-Undang PPh dan Peraturan Pelaksanaannya*.

Vaknin, S. (2002, 2009) .*TrendSitters Digital Content And Web Technologies 4th EDITION*. Lidija Rangelovska, Republic Of Macedonia.

Walter W. Powell and Kaisa. (2004). *THE KNOWLEDGE ECONOMY*, School of Education and Department of Sociology Stanford University.

Wendt, A. (1999). *Social Theory of International Relation*. Cambridge University Press, Cambridge.

SURAT EDARAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016 *TENTANG PENYEDIAAN LAYANAN APLIKASI DAN/ATAU KONTEN MELALUI INTERNET (OVER THE TOP)*. Melalui <https://www.kominfo.go.id/>

Google capai kesepakatan soal pembayaran pajak di Indonesia, Melalui (<http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40258540> akses 13 Juni 2017)

https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3980/Kemkominfo%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+Capai+82+Juta/0/berita_satker. diakses 08 Mei 2014.

<http://tekno.kompas.com/read/2016/09/19/09153207/masalah.pajak.yang.membeli.t.google.di.indonesia>. diakses pada tanggal 19/09/2016.